

# Siaran Pers

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi NTT



## Pemerintah Kabupaten Kupang kembali Menerima WDP

**Kupang, 21 Juli 2022** - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2021. LHP LKPD tersebut diserahkan Oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT (**Adi Sudiby**) kepada Ketua DPRD Kabupaten Kupang (**Daniel Taimenas**) dan Bupati Kupang (**Korinus Masneno**) secara langsung di Oelamasi Kabupaten Kupang.

Atas LKPD TA 2021 Kabupaten Kupang, BPK RI memberikan Opini *Wajar Dengan Pengecualian (WDP)*. Opini tersebut sama dengan opini TA 2020. Permasalahan yang masih menjadi pengecualian atas LKPD Kabupaten Kupang TA 2021 yaitu Aset Tetap yang terdiri dari:

1. Aset tetap tanah yang belum bisa dicatat, bernilai Rp1/0 atau belum sesuai harga wajar, dan aset tanah yang belum dapat ditelusuri keberadaannya;
2. Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang belum dapat ditelusuri keberadaannya dan belum diatribusi/dikapitalisasi ke aset induk;
3. Aset Tetap Hibah yang belum dapat dicatat; dan
4. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang belum dapat ditelusuri kejelasan status penyelesaiannya, dan tidak sesuai dengan kondisi riil.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Kupang diharapkan agar segera menindaklanjuti pengecualian tersebut sehingga tidak menjadi lebih besar dan dapat mempengaruhi opini ditahun yang akan datang.

**HUMAS BPK PERWAKILAN PROVINSI NTT**

### Informasi lebih lanjut:

Humas BPK Perwakilan Provinsi NTT  
Jl. W.J. Lalamentik No.91, Kupang, Nusa Tenggara Timur  
Telp.(0380) 840605, Fax. (0380) 840601, Email : perwakilan.ntt@bpk.go.id